



EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LOK BANGKAI KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ahmad Bahrul Ilmi¹, Reno Affrian², Saidah Hasbiah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: elmybahrul21@gmail.com

ABSTRAK

BUMDES merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat Hasil dari penelitian menunjukkan kurang efektif. Pertama, pada aspek keberhasilan program diketahui indikator kemampuan operasional yang kurang efektif. Kedua, pada aspek keberhasilan sasaran diketahui indikator tingkat output terhadap pencapaian tujuan kurang efektif. Ketiga, pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh diketahui indikator pelaksanaan tugas organisasi dalam pencapaian tujuan kurang efektif terlihat dari belum dilibatkannya masyarakat serta hasil pendapatan yang belum bisa digunakan karena labanya masih sedikit. Usahanya yang memang sudah jarang diminati masyarakat. Keempat, pada aspek tingkat input dan output diketahui indikator perbandingan input dan output kurang efektif, terlihat dari pemasukan dan pengeluarannya hampir sama karena untuk masyarakat Desa Lok Bangkai tidak dipungut biaya dan memang jarang ada pelanggannya. Kelima, pada aspek kepuasan terhadap program diketahui indikator kualitas yang diberikan sudah baik. Serta masyarakatnya yang merasa tidak dipersulit karena setiap masyarakat ingin menyewa pengelola selalu cepat dalam memberikan layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari: Faktor yang mendukung yaitu, tersedianya penyertaan modal serta kualitas pelayanan yang baik. Faktor yang menghambat tempat pemasaran barang yang kurang strategis, dan kurangnya sosialisasi dan kurangnya rasa tanggungjawab dari pengelola.

Kata Kunci : Efektivitas, Bumdes

ABSTRACT

BUMDES is one of the institutions where there is economic interaction between the village government and the community. The results of the research show that it is less effective. First, in the aspect of program success, it is known that operational capability indicators are less effective. Second, in the aspect of target success, it is known that indicators of the level of output in achieving goals are less effective. Third, in the aspect of achieving overall goals, it is known that indicators of the implementation of organizational tasks in achieving goals are less effective, as can be seen from the lack of involvement of the community and the income that cannot be used because the profits are still small. . His business is rarely of interest to the public. Fourth, in the aspect of input and output levels, it is known that the input and output comparison indicators are less effective, as can be seen from the fact that income and expenditure are almost the same because for the people of Lok Bangkai Village there is no charge and there are rarely any customers. Fifth, in the aspect of satisfaction with the program, it is known that the quality indicators provided are good. And the people who feel that it is not difficult because every community wants to hire a manager who is always quick in providing services. The influencing factors consist of: Supporting factors, namely, the availability of capital participation and good service quality. Factors that hinder the marketing of goods are less strategic, and there is a lack of socialization and a lack of sense of responsibility from managers.

Keywords: Effectiveness, Bumdes

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang Desa.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan Pendapatan Desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDES itu sendiri.

Namun berdasarkan hasil observasi sementara di ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Kurang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dana BUMDes sesuai keinginan pemerintah desa seperti masyarakat hanya meminjam modal kedesa untuk usaha sendiri tanpa adanya timbal balik kedesa. Hal ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara masyarakat

dengan pengelolaan BUMDes

2. Kurang adanya sosialisasi & Kurangnya kemampuan SDM pengelola/pengurus BUMDes untuk memajukan BUMDes dimana kurangnya pengetahuan dalam berbisnis sehingga tidak ada kejelasan dalam mencapai tujuan dan mengelola BUMDes sehingga menyebabkan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes masih kurang berjalan dengan baik.
3. Fasilitas yang kurang memadai dalam Efektivitas BUMDes seperti penyediaan ATK yang mulai menipis, Alat cuci kendaraan yang sering rusak karena sering digunakan dan pangkalan LPJ yang kurang memuaskan masyarakat dalam penyediaan Gas

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui *Purposive sampling* informan berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

PEMBAHASAN

Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaji berdasarkan beberapa variabel Menurut Campbell J.P, dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014: 96-97). Adalah sebagai berikut:

A. Keberhasilan Program

Kemampuan Operasional

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesimpulan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kemampuan operasional dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai yang kurang efektif terlihat dari kurangnya tanggungjawab dari pengelola terhadap tugasnya terlihat dari tidak adanya pelatihan kepada pengelola sehingga tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan BUMDes tersebut hal ini dilihat dari minimnya peningkatan pendapatan BUMdes Lok Bangkai.

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Menurut Campbell J.P, (1970), dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014: 96) terkait efektivitas pengelolaan yang diukur dari keberhasilan program dalam hal kemampuan operasional.

B. Keberhasilan Sasaran

Tingkat Output Terhadap Pencapaian Tujuan

Tingkat output terhadap pencapaian tujuan yang mengatur strategi untuk mencapai kesuksesan bersama.

Kesimpulan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa tingkat output kurang efektif terlihat dari Desa Lok Bangkai masih belum mencapai target pendapatan pertahunnya karena dari empat usaha tersebut sudah ada satu usaha yang macet yaitu cuci kendaraan karena lokasinya di dalam gang sehingga tidak terlalu diketahui keberadaannya apalagi masyarakat terdekat mencuci kendaraan mereka dirumah masing-masing sehingga jarang ada yang menggunakan jasa tersebut. Dan pada usaha pembayaran listrik, pembelian pulsa dan ATK, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui sehingga modal sulit diputar kembali.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Menurut Campbell J.P, (1970), dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014: 96) terkait efektivitas pengelolaan yang diukur dari tingkat keberhasilan sasaran dalam hal tingkat output terhadap pencapaian tujuan kurang efektif.

C. Kepuasan Terhadap Program

Kualitas Yang Dihilkan

Kualitas yang diberikan oleh suatu program menjadi penguat efektivitas suatu program.

Kualitas jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai sudah efektif terlihat dari penilaian kepala desa, sekretaris, aparat, dan masyarakatnya yang tidak merasa dipersulit dan mengeluhkan tentang kualitas pelayanannya karena setiap masyarakat ingin menyewa tenda, pembelian isi ulang gas elpiji 3kg, pembayaran listrik dan pembelian pulsa dalam BUMDes, pengelola selalu cepat dalam memberikan layanan tersebut.

Berdasarkan Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Menurut Campbell J.P. (1970), dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014:96) terkait efektivitas pengelolaan yang diukur dari tingkat kepuasan terhadap program dalam hal kualitas jasa yang diberikan.

D. Tingkat Input Dan Output

Perbandingan Input Dan Output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

Kesimpulan hasil wawancara, observasi menunjukkan bahwa perbandingan input dan output Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai Kurang efektif terlihat dari pemasukan dan pengeluarannya hampir sama karena untuk masyarakat Desa Lok Bangkai tidak dipungut biaya, hanya untuk masyarakat luar saja, sedangkan masyarakat luar jarang menyewa tenda tersebut. Untuk pencucian motor juga tidak terurus karena orang yang datang mencuci motor hanya orang dekat sehingga tidak tega untuk dipungut biaya dan menyebabkan alat pencucian motor tersebut rusak karena sering digunakan. Sama halnya dengan pembayaran listrik dan pembelian pulsa masyarakat bisa berhutang sehingga menyebabkan pemasukan lambat dan maka dari itu labanya tidak banyak.

Berdasarkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Menurut Campbell J.P. (1970), dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014: 96) terkait efektivitas pengelolaan yang diukur dari tingkat input dan output dalam hal perbandingan input dan output.

E. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pelaksanaan Tugas Organisasi Dalam Pencapaian Tujuan

Suatu organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama, pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan itu dibutuhkan kerjasama, kegiatan dan rangkaian tugas, agar masing-masing orang mengetahui fungsi dan tugasnya.

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas organisasi dalam pencapaian tujuan Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai kurang efektif terlihat dari belum dilibatkannya masyarakat serta hasil pendapatan yang belum bisa digunakan karena labanya masih sedikit sehingga masih belum bisa untuk menggaji pengelola.

Berdasarkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Menurut Campbell J.P. (1970), dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014: 96) terkait efektivitas pengelolaan yang diukur dari pencapaian tujuan menyeluruh dalam hal pelaksanaan tugas organisasi dalam pencapaian tujuan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1) Faktor Pendukung

a. Kualitas Pelayanan yang baik

Kepuasan terhadap suatu program dapat menentukan program tersebut mencapai keberhasilan atau tidak. Semakin baik hasil yang didapatkan semakin berhasil pula program tersebut.

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor pendorong efektivitas Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai adalah kualitas pelayanan yang baik terlihat dari penilaian Kepala Desa, Sekretaris dan Pengelola yang mengatakan kualitas pengelolanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cepat dalam merespon keinginan masyarakat seperti di penyewaan tenda, pembayaran listrik dan pembelian pulsa.

b. Modal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung BUMDes didesa lok bangkai ini sudah efektif dari pemerintah desa dan juga masyarakat didesa untuk kemajuan BUMDes didesa lok bangkai ini.

c. Fasilitas

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung BUMDes didesa lok bangkai ini sudah bagus dari pemerintah desa dan juga masyarakat didesa untuk kemajuan BUMDes didesa lok bangkai ini.

2) Faktor Penghambat

a. Kurangnya sosialisasi tentang BUMDES kepada Masyarakat

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kurangnya kerjasama dari masyarakat, masih banyak yang belum mengetahui adanya Badan Usaha Milik Desa hal itu mengakibatkan keterlibatan masyarakat sangat minim dan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan.

b. Tidak Adanya Gaji Untuk Pengelola

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai adalah kurangnya sumber daya manusia dalam pengelanaan terlihat dari belum dilibatkannya masyarakat dikarenakan tidak adanya gaji karena masih sedikitnya hasil pendapatan.

c. Kurangnya Tanggungjawab dari pengelola

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai adalah kurangnya tanggungjawab pengelola terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang berhutang karena kurang tegas nya pengelola. Dan pada tanggungjawabnya terlihat dari pengelola yang sering sibuk karena urusan pribadi dan mengesampingkan tanggungjawab sebagai pengelola sehingga sulit untuk mendapatkan pendapatan BUMDes ini ditambah lagi usaha ini jarang ada pelanggannya.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lok Bangkai pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Pertama, pada aspek keberhasilan program diketahui indikator kemampuan operasional yang kurang efektif terlihat pada pendapatan yang semakin tahun semakin sedikitnya hasil laba karena tidak adanya pelatihan kepada pengelola. Kedua, pada aspek keberhasilan sasaran diketahui indikator tingkat output terhadap pencapaian tujuan kurang efektif terlihat dari BUMDes Lok Bangkai masih belum mencapai target karena dari empat usaha tersebut sudah ada usaha yang macet. Hasil pendapatan yang masih dikumpulkan, karena usahanya tidak dipungut biaya untuk masyarakat dalam desa. Ketiga, pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh diketahui indikator pelaksanaan tugas organisasi dalam pencapaian tujuan kurang efektif terlihat dari belum dilibatkannya masyarakat serta hasil pendapatan yang belum bisa digunakan karena labanya masih sedikit. Usahanya yang memang sudah jarang diminati masyarakat. Keempat, pada aspek tingkat input dan output diketahui indikator perbandingan input dan output kurang efektif, terlihat dari pemasukan dan pengeluarannya hampir sama karena untuk masyarakat Desa Lok Bangkai tidak dipungut biaya dan memang jarang ada pelanggannya. Kelima, pada aspek kepuasan terhadap program diketahui indikator kualitas yang



diberikan sudah baik terlihat dari Desa Lok Bangkai penilaian masyarakat yang mengatakan kualitas pelayanan pengelola sudah baik karena pengelola tidak mempersulit masyarakat yang belum bisa membayar tepat waktu. Serta masyarakatnya yang merasa tidak dipersulit karena setiap masyarakat ingin menyewa pengelola selalu cepat dalam memberikan layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara: Faktor yang mendukung yaitu, tersedianya penyertaan modal serta kualitas pelayanan yang baik. Faktor yang menghambat yaitu, dari tempat pemasaran barang yang kurang strategis, dan kurangnya sosialisasi dan kurangnya rasa tanggungjawab dari pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ambar, Teguh Sulistyani. 2017. *Kemitraan Dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUTASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG

- PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- Anwas, dr. Oos, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, CV. Alfa, Bandung.
- Bintarto. 2017. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu: Jakarta.
- Budiani. 2012. *Sistem Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Damayanti, Citra Tirtaningtyas. 2019. *Peran BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul*. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.
- Dilla, Sumadi. 2019. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hapsoyo, Sunarto dan Yasin, Sulkan. 2012. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoristis, dan Empiris* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, Agung. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lubis dan Martani. 2013. *Manajemen Personalialia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2012. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 2016. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta,
- Rusdiana, Qori. 2019. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Sebagai Pilar Perekonomian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 1. Cetakan Keempat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tangkilisan. 2015. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.
- TIM Penyusun STIA, 2023. *Pedoman Penyusunan dan Penuisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. Amuntai: STIA.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta